

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan, kesehatan yang buruk, harapan hidup yang rendah dan ketidaksetaraan distribusi pendapatan dan kekayaan bersifat endemic diseluruh Dunia. Banyak Negara memiliki pertumbuhan positif yang amat tinggi dan ada juga Negara yang pertumbuhan negative atau teramat rendah. Bahkan sejumlah Negara yang diberkahi dengan sumber daya alam mencatat rekor tingkat pertumbuhan yang buruk dan pendapatan perkapita yang rendah.¹

Salah satu adalah Indonesia, Indonesia merupakan salah satu Negara dengan sumber daya alam yang sangat kaya dan jumlah penduduk yang banyak tetapi mencatat pertumbuhan ekonomi yang buruk dan pendapatan per kapita yang rendah padahal Indonesia sendiri adalah Negara Hukum yang selalu mementingkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi/golongan istilah Negara hukum (*Rechtsstaat*) tidak asing lagi dalam ilmu pengetahuan ketatanegaraan sejak zaman purba hingga sekarang ini. Hanya didalam praktek ketatanegaraan Orang masih menyangsikan apakah Negara hukum itu sudah dilaksanakan sepenuhnya?. Hal ini dapat dimengerti karena dalam praktek, pengertian yang bersih menurut teori, masih perlu diperhitungkan dengan factor factor yang nyata yang hidup dalam masyarakat menurut waktu dan tempat.

¹ Susan Rose-Akermen, Korupsi Pemerintahan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006, Hal 1.

Karena itu tidaklah mengherankan, sebab cita cita yang universal mengenai Negara hukum hanya bersifat formil, artinya hanya terdapat dalam aturan das-Sollen sesuatu yang seharusnya diwujudkan, sedangkan kenyataan yang hidup das-Sein sudah jauh menyimpang dari yang dituliskan dalam konstitusi sehingga seolah olah Negara hukum ini hanya suatu mitos saja yang belum pernah terbukti dalam sejarah ketatanegaraan.²

“ Negara Indonesia adalah Negara hukum, artinya segala sesuatu harus berdasarkan hokum (*Rechsstaat*), Tidak didasarkan atas kekuasaan belaka (*Machsstaat*)” .Dari hal ini, dapat diketahui bahwa Negara Indonesia menerima hukum sebagai ideology untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan sehingga hukum itu mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh WNI dari tingkat penyelenggara maupun rakyat jelata ”.³

Usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya dan serta tindak pidana korupsi pada khususnya perlu secara terus menerus ditingkatkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Sejarah membuktikan hampir tiap Negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tapi di Indonesia masalah korupsi sudah tidak menjadi rahasia umum tapi dengan adanya hal itu maka bangsa Indonesia melakukan berbagai perubahan untuk mencapai suatu tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan beradap yang bebas dari korupsi, masalah korupsi sudah sangat jelas temaktub dalam KUHP

² Natangsa Surbakti, Filsafat Hukum, Universitas Muhamadiyah Surakarta, Surakarta, 2005, Hal 166.

³ Daftar Alamat tempat pejabat Negara R.I. Jakarta, 1980 ; Departemen Penerangan R.I hal 225.

pasal 418 mengancam pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah bagi seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan.⁴

Ketentuan mengenai pemberantasan korupsi telah ada sejak berlakunya *peraturan penguasa militer* tanggal 9 April 1957 Nomor *Prt/PM/06/1957*, tanggal 27 Mei 1957 Nomor *Prt/PM/03/1957*, dan Tanggal 1 Juli 1957 Nomor *Prt/PM/011/19057*. Berhubung dengan berlakunya pasal 60 *Undang-Undang Keadaan Bahaya Nomor 74 Tahun 1957 pada tanggal 17 April 1958* yang berbunyi;” akan tidak berlaku lagi peraturan penguasa militer tersebut di atas menurut hukum “, maka diganti dengan *peraturan pemerintah pemberantasan korupsi Prn Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/peperpu/013/1958*, yang ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 16 April 1958 dan disiarkan di BN Nomor 40/1958.⁵

Dalam konsideran peraturan ini, khususnya pada butir *a* dikatakan ” Bahwa untuk perkara-perkara pidana yang menyangkut keuangan Negara atau daerah atau badan hukum yang mempergunakan modal dan atau kelonggaran-kelonggaran lainya dari masyarakat misalnya bank, koperasi, wakaf dan lain-lain atau yang bersangkutan dengan kedudukan sipembuat pidana, perlu diadakan

⁴ Martiman prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001, Hal 7.

⁵ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia “Masalah dan Pemecahannya”*, Gramedia, Jakarta, 1986, Hal 38.

pertambahan beberapa aturan pidana pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan yang disebut korupsi “. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa pembuat peraturan masih berusaha memperbaiki dan menambah peraturan yang terdahulu agar lebih efektif dalam pemberantasan korupsi.⁶

Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa pembuat peraturan masih berusaha memperbaiki dan menambah peraturan yang terdahulu agar lebih efektif dalam pemberantasan korupsi kemudian yang menjadi focus dari peraturan ini adalah bentuk khusus dari perbuatan korupsi, yaitu yang menyangkut keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan atau kelonggaran yang lain dari masyarakat, ini dapat dimengerti karena pada saat pembuatan peraturan ini (sekitar 1957-1958) ramai pengambilalihan dan pengurusan perusahaan-perusahaan milik Belanda menjadi perusahaan Negara.⁷ Maksud serta tujuan semula dari peraturan-peraturan penguasa perang ini adalah agar dengan penguasa peraturan-peraturan perang tersebut di dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat diberantas perbuatan-perbuatan korupsi yang waktu itu sangat merajalela sebagai akibat dari suasana bahwa seakan-akan pemerintah sudah tidak berwibawa lagi.⁸ Mungkin karena berlakunya suatu peraturan penguasa perang pusat itu hanya bersifat temporer, padahal perbuatan korupsi itu dapat dilakukan tidak di dalam keadaan perang,

⁶ *Ibid.* Hal 39.

⁷ *Ibid.* Hal 39.

⁸ Penjelasan Umum UU no. 24 Prp, Tahun 1960.

maka pemerintah menganggap bahwa peraturan-peraturan penguasa tersebut perlu diganti dengan peraturan yang berbentuk undang-undang.⁹

Kemudian pada tahun 60-an dibuat sebuah undang-undang yaitu UU No.24 PrP Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Mengingat undang undang itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan Zaman pada tahun 70-an maka pemerintah melakukan perubahan dengan diganti UU No. 3 Tahun 1971 dan kemudian diperbaharui lagi pada tahun 1999 menjadi UU No.31 Tahun 1999.¹⁰

Dengan berlakunya undang undang ini, maka peraturan perundang-undangan terdahulu dinyatakan dicabut/tidak berlaku lagi, yakni undang undang nomer 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.¹¹

Subyek tindak pidana korupsi ini adalah Orang perorangan dan korporasi, latar belakang perubahan dari undang undang nomer 3 Tahun 1971, kemudian dirubah lagi dengan undang undang Nomer 31 Tahun 1999, pembentukan undang-undang Nomer 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi didasarkan pada beberapa pertimbangan, yakni; (a) bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; (b) Bahwa akibat dari tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan

⁹ R. Wiyono, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Alumni Bandung, Bandung, 1983, Hal 1.

¹⁰ Natangsa Surbakti, Hukum Pidana Khusus, Universitas Muhamadyah Surakarta, Hal 73.

¹¹ Ib id., Hal 73.

Negara juga menghambat pertumbuhan keuangan Negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional, yang menuntut efisien tinggi; (c) Bahwa UU NO. 3 Th 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-Undang pemberantasan yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Disamping itu pembentukan dari undang-undang ini juga dimaksudkan untuk melaksanakan amanat majelis permusyawaratan rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.¹²

Landasan filosofis dirubahnya undang-undang No. 31 Tahun 1999 ke undang-undang No. 20 Tahun 2001, yakni; (a) Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasnya perlu dilakukan secara luar biasa; (b) Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindarkan keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak hak social dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.¹³

¹² Ibid, Hal 73-74.

¹³ Ibid, Hal 74.

Perbuatan perbuatan yang dijadikan tindak pidana korupsi menurut UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 ini dapat didefinisikan dari rumusan tindak pidananya. Dilihat dari pola penempatan norma dan sanksinya, maka rumusan tindak pidana korupsi di dalam undang undang ini memuat secara bersama sama dalam satu pasal uraian unsur-unsur perbuatan yang dilarang dengan sanksi atau pidana yang diancamkan.

Pola perumusan dalam undang undang ini, ditandai dengan penetapan ancaman pidana minimum dan pidana maksimum secara khusus, artinya pasal demi pasal. Selain itu, dalam tindak pidana secara substansif dianggap berat, ancaman pidana pokok bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan pidana denda. Sementara itu, dalam tindak pidana yang dianggap kualifikasinya lebih ringan, ancaman pidananya bersifat alternative. Jenis pidana yang diancamkan pada tindak pidana korupsi, meliputi pidana pokok yang terdiri dari pidana penjara dan denda, sedangkan pidana mati diposisikan pidana yang bersifat khusus, yang penjatuhannya hanya dimungkinkan secara sangat selektif. Pidana tambahan terhadap tindak pidana sangat bervariasi dari hanya dijatuhi denda atau hanya pengembalian uang hasil korupsi.

Pertanggung jawaban pidana bagi pelaku korupsi yang mengembalikan uang hasil korupsi dan apa akibat yang ditimbulkan dari pengembalian uang hasil korupsi? Apakah dengan pengembalian uang hasil korupsi pelaku korupsi tetap dijatuhi pidana atau tidak?. Pelaku tindak pidana korupsi tetap dijatuhi hukuman pidana karena didasarkan pada pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20

Tahun 2001 yaitu “ Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 ”. Jadi dapat dikatakan, walaupun uang itu pada akhirnya dikembalikan, yang berarti Negara tidak rugi, delik korupsi dipandang telah terjadi, dalam hal ini, dikemukakan pendapat para penulis hukum pidana khususnya pertanggungjawaban pidana, baik yang memisahkan perbuatan pidana maupun yang tidak salah satunya adalah “ simons “ dia merumuskan delik; Suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.¹⁴ Berdasarkan alasan itu, maka penulis mengambil skripsi tentang pertanggungjawaban pidana bagi koruptor yang mengembalikan uang hasil korupsi. Sehingga penulis merumuskan judul ini yaitu ” **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORUPTOR YANG MENGEMBALIKAN UANG HASIL KORUPSI** ”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah ;

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana yang ditimbulkan dari pengembalian uang hasil korupsi tersebut?

¹⁴ Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia”Masalah dan Pemecahannya”, Gramedia Jakarta, Jakarta, 1986, Hal 63.

2. Bagaimana putusan pidana terhadap koruptor yang mengembalikan uang hasil korupsi?

C. Kerangka Teoritis

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang berupa perbuatan memperkaya diri sendiri atau Orang lain atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum dan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Sumber tindak pidana korupsi ini adalah undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Undang-Undang ini mulai berlaku 16 Agustus 1999, termuat di dalam lembaran Negara No 140 Tahun 1999. Undang-Undang 31 Tahun 1999 nomor 31 Tahun 1999. Undang-Undang ini telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diundangkan dan mulai berlaku 21 April 2001, termuat di dalam lembaran Negara nomor 134 Tahun 2001. Dengan adanya perubahan ini, maka sumber Hukum tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁵

¹⁵ Natangsa Surbakti, Hukum Pidana Khusus, Universitas Muhamadyah Surakarta, Hal 72.

Undang undang nomer 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo undang undang nomor 20 Tahun 2001, memuat asas atau prinsip hukum yang sangat penting dan bersifat khusus (spesifik) dalam lingkup hukum pidana khusus dibidang tindak pidana korupsi ini. Adanya asas hukun ini, menandai perubahan penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penegakan hukum pidana. Asas hukum dimaksud terdapat dalam pasal 4 yang memuat pernyataan “pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3”.¹⁶

Dengan adanya asas ini, maka secara yuridis formulasi tindak pidana korupsi mengalami perubahan yang semula didalam undang undang nomer 3 Tahun 1971 rumusan tindak pidana korupsi ini bersifat materiel, dalam untuk terjadinya tindak pidana mensyaratkan adanya akibat kongkrit berupa kerugian keuangan/perekonomian Negara, sedangkan dalam undang undang nomer 31 Tahun 1999 jo Undang undang nomer 20 tahun 2001 ini beralih bersifat formal, dalam arti untuk terjadinya tindak pidana korupsi tidak mensyaratkan adanya kerugian keuangan/perekonomian Negara. Jadi sepanjang perbuatan kongkrit yang dilakukan telah memenuhi rumusan tindak pidana korupsi, maka berdasarkan asas hukum yang terkandung dalam pasal 4 tetap dikenai sanksi,

¹⁶ Ibid, Hal 75.

meskipun kerugian keuangan dikembalikan/dipulihkan oleh sipelaku, pembedaan tetap dapat dilakukan.¹⁷

Mengenai dasar pembedaan terhadap pengembalian uang hasil korupsi ini, ada beberapa teori yang mendukung dijatuhkannya pidana bagi koruptor yang mengembalikan uang hasil korupsi walaupun itu adalah sebuah percobaan, yaitu;

1. Teori Subyektif.

Menurut teori ini dasar patut dipidanya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari si pembuat. Penganut teori ini adalah Van Hamel.

2. Teori Obyektif.

Menurut teori ini, dasar patut dipidanya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh sipembuat. Teori ini terbagi menjadi 2, yaitu;

- a. Teori obyektif-formil, yang menitik beratkan sifat berbahayanya perbuatan itu terhadap tata hukum. Menurut teori ini suatu delik merupakan suatu rangkaian dari perbuatan-perbuatan yang terlarang dengan demikian apabila seseorang melakukan perbuatan percobaan, berarti ia telah melakukan sebagian rangkaian dari delik yang terlarang itu, ini berarti telah membahayakan (terlarangnya) tata hukum. Penganut teori ini adalah Duynstee dan Zevenbergen.

¹⁷ Ibid, Hal 76.

- b. Teori Obyektif-materiil, yang menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan terhadap kepentingan/benda hukum. Pengikutnya adalah a.l. Simons.

3. Teori Campuran.

Teori ini melihat dasar patut dipidanya percobaan dari dua segi, yaitu; sikap batin pembuat yang berbahaya (segi subyektif) dan juga sikap berbahayanya perbuatan (teori subyektif). Termasuk dalam teori ini pendapat langemeyer dan jonkers, namun karena dalam kenyataannya, pelaksanaan letih cenderung pada teori subyektif. Prof. Mulyatno dapat dimasukkan dalam golongan teori campuran. Menurut beliau rumusan delik percobaan dalam pasal 53 KUHP mengandung dua inti, yaitu yang subyektif (niat untuk melakukan kejahatan tertentu) dan yang obyektif (kejahatan tersebut telah mulai dilaksanakan tetapi tidak selesai). Dengan demikian menurut beliau, dalam percobaan tidak mungkin dipilih salah satu diantara teori subyektif dan teori obyektif karena jika demikian berarti menyalahi dua inti dari delik percobaan itu; ukurannya harus mencakup dua kriteria tersebut (subyektif dan obyektif). Disamping itu beliau mengatakan baik teori subyektif dan obyektif, apabila dipakai secara murni akan membawa kepada ketidakadilan.¹⁸

¹⁸ Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Badan Penyedia Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1984, Hal 3-4.

Penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh pengadilan dapat dilihat dari berbagai aspek yang didukung teori dari beberapa Tokoh;

1. Dari Aspek Politis

Teori ini berkembang pada Abad ke-19 yang dikemukakan oleh *Hans kelsen* dalam bukunya "*Reine Rechtslehre*" bahwa hukum itu ialah tidak lain dari pada "kemauan Negara" (*Wille des states*). Namun demikian, Hans kelsen mengatakan bahwa orang taat kepada hukum bukan karena Negara menghendaknya, tetapi orang taat kepada hukum karena ia merasa wajib mentaatinya sebagai perintah Negara.¹⁹ Dalam hal ini berarti hukum adalah produk Negara yang wajib ditaati oleh masyarakat, apapun perintah Negara yang menyangkut hukum masyarakat wajib mentaati termasuk aparat penegak hukum sekalipun, harus mentaati perintah Negara tanpa kecuali.

2. Aspek Yuridis

Aspek ini didukung oleh *Prof.Mr H. Krabe* dengan teorinya yaitu teori Kedaulatan Hukum dan dia mengatakan bahwa sumber hukum adalah rasa keadilan. hukum hanyalah apa yang memenuhi dari rasa keadilan dari orang terbanyak yang ditundukkan kepadanya, suatu peraturan perundang undangan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan dari jumlah terbanyak orang,

¹⁹ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, Hal 62.

tidak dapat mengikat. Peraturann perundang undangan yang demikian bukanlah hukum, walaupun ia masih ditaati ataupun dipaksakan.

Hukum itu ada, karena anggota masyarakat mempunyai perasaan bagaimana seharusnya hukum itu. Hanyalah kaedah yang timbul dari perasaan hukum anggota suatu masyarakat, mempunyai kewibawaan/kekuasaan.²⁰

3. Aspek Sosiologis

Bahwa kesadaran hukum Orang menjadi sumber hukum, hukum itu berfungsi menurut suatu dalil yang nyata(riil), dalil yang nyata yang menjadi dasar berfungsinya kesadaran hukum orang dirumuskan oleh *kranenburg* sebagai berikut; tiap orang menerima keuntungan atau mendapatkan kerugian sebanyak banyaknya dasar-dasar yang telah ditetapkan atau diletakkan terlebih dahulu, ialah bahwa tiap tiap anggota masyarakat hukum sederajat dan sama dan dalil ini dinamakan Asas keseimbangan, berlaku dimana –mana dan pada waktu apapun.²¹ Dan dalam aspek ini lebih dikenal dengan sebutan *sociological jurisprudence*, memberi perhatian yang sama kuatnya terhadap masyarakat dan hukum sebagai dua unsur utama hukum dalam menciptakan dan memberlakukanya. Inti dasar aspek ini adalah bahwa; Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat.²²

d. Aspek Filosofis

²⁰ *Ibid*, Hal 63.

²¹ *Ibid*, Hal 64.

²² Natangsa Surbakti, *Filsafat Hukum*. Universitas Muhamadiyah Surakarta, Surakarta, 2005 Hal 58.

Bahwa hukum mempunyai paradigma yaitu perspektif dasar.²³ Bahwa berdasar aspek ini dapat dilihat dari segi praktis atau fungsional, yaitu menggunakan cara berfikir yaitu berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh dengan kata lain orang dalam menerapkan hukum dengan pemikiran yang mendalam dan dengan sungguh sungguh.²⁴ Tokoh dari teori ini adalah *Thomas S. Khun* bahwa perspektif dasar maka Kuhn menemukan rangkaian proses pertumbuhan sains dalam hukum sendiri dan melalui proses ini maka paradigma lama dapat diganti dengan paradigma yang baru karena untuk mengikuti perkembangan jaman yang semakin menuntut perkembangan yang maju.²⁵

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian itu adalah.

- a. Untuk mengetahui dasar apa yang dijadikan Hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan uang hasil korupsi.
- b. Untuk mengetahui apakah dengan pengembalian uang hasil korupsi itu dapat menghapuskan sanksi pidana atau tidak?.

²³ Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Surakarta Muhammadiyah University Press, Surakarta, Hal 59.

²⁴ Natangsa Surbakti, Filsafat Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Hal 2.

²⁵ Ibid., Hal 49.

c. Untuk mengetahui sanksi apa yang tepat bagi pelaku korupsi.

2. Kegunaan Penelitian.

Kegunaan penulis mengadakan penelitian ini adalah;

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang dasar penjatuhan pidana dan sanksi yang paling tepat bagi pelaku tindak pidana korupsi khususnya di wilayah Surakarta.
- b. Diharapkan secara akademis dapat menambah sumber informasi tentang ilmu pidana pada khususnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat Deskriptif. Hal ini dilakukan untuk mendeskripsikan dasar apa yang dijadikan Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana korupsi walaupun uang hasil korupsi sudah dikembalikan ke pemerintah kota surakarta.

2. Metode pendekatan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Metode pendekatan penelitian Yuridis sosiologis dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan menyeluruh tentang perlunya sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi.

3. Sumber Data.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah;

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dilapangan yaitu Hakim dan pihak yang dianggap paham dalam masalah ini.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari kepustakaan yang dalam hal ini yaitu;
 - 1) Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah UU No 31 Th 1999 jo UU No 20 Th 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan UU No 4 Th 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman.
 - 2) Bahan hukum Sekunder meliputi hasil karya ilmiah para pakar sarjana dan hasil penelitian.

4. Metode pengumpulan Data

Untuk memperoleh data data yang diperlukan dalam penelitian ini, dan disesuaikan dengan pendekatan Yuridis Sosiologis dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis adalah sebagai berikut;

- a. Studi lapangan (Field Research); Merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti dalam rangka memperoleh data primer dengan cara wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung baik lisan maupun tulisan dengan responden yaitu Hakim dan pihak yang dianggap mengetahui tentang masalah ini.

- b. Studi kepustakaan (Library Research); Merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundangan, laporan-laporan, majalah-majalah, serta segala hal yang berkaitan dengan masalah ini.

5. Metode Analisis Data.

Penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisis data yang menggunakan dan memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban responden untuk dicari hubungan antara data yang satu dengan yang lain kemudian disusun secara sistematis.

Metode analisis data kualitatif dilakukan dengan cara menyeleksi data-data yang telah terkumpul dan memberikan penafsiran terhadap data-data itu baru kemudian menarik kesimpulan.²⁶

F. Sitematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman terhadap skripsi ini, maka disusun dengan sistematika yang terdiri dari empat bab.

Pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka teoritis, kegunaan penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penelitian.

Tinjauan Pustaka. Tinjauan pustaka dalam hal ini menguraikan mengenai tinjauan umum yang terbagi dalam empat sub bab yaitu tinjauan umum tentang

²⁶ Winarno Surakhman, Paper, Skripsi, Disertasi, Bandung; 1998, Hal 16.

tindak pidana korupsi, tinjauan tentang akibat Hukum yang ditimbulkan, hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta hambatan-hambatan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan berisi pertanggung jawaban pidana terhadap pengembalian uang hasil korupsi, beberapa kasus tindak pidana korupsi, faktor – faktor yang berpengaruh dalam penjatuhan sanksi tindak pidana korupsi dan putusan pidana terhadap koruptor yang mengembalikan uang hasil korupsi. Dengan menggunakan data yang diperoleh dalam penelitian baik data primer atau data sekunder

Penutup. Berisi tentang kesimpulan dan saran yang menjadi penutup dari skripsi ini.

Literatur-Literatur

Lampiran-lampiran

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.